

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan desa atau pembangunan terhadap masyarakat desa. Dalam melaksanakan tujuan pembangunan, maka segala potensi yang ada harus dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan tercapainya pelaksanaan program pembangunan.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk pelaksanaan program pembangunan, kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Selain partisipasi aktif masyarakat setempat, tampaknya juga diperlukan peran pemerintah untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi dan menyalurkan anggaran sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan pedesaan. Anggaran Pembangunan Desa termasuk dalam

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), khususnya dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan penyaluran Alokasi Dana Desa atau lebih dikenal dengan sebutan ADD Mendorong pembiayaan program kerja pemerintahan desa. Namun pada kenyataannya, mengandalkan dana desa untuk pembangunan desa saja tidak cukup dan memerlukan dukungan dari masyarakat desa yaitu partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasilnya akan bermanfaat jika rencana pembangunan difokuskan dan dilaksanakan serta dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan prinsip demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung sebagai bentuk partisipasi bukan untuk mobilisasi. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan membutuhkan peran serta seluruh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan ditingkat daerah. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, masyarakat perlu berpartisipasi. Perlunya pembinaan masyarakat oleh pemerintah dalam merencanakan apa yang dibutuhkan.

Perencanaan pembangunan akan tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya apabila dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam melaksanakan

perencanaan pembangunan membutuhkan peran serta seluruh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan ditingkat daerah. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, masyarakat perlu berpartisipasi. Perlunya pembinaan masyarakat oleh pemerintah dalam merencanakan apa yang dibutuhkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Desa Lampuara merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian menjadi seorang petani. Dalam hal ini perlu tindak lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Lampuara. Sesuai dengan isi yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Dengan cara ini akan semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat harus mampu merumuskan sendiri atas permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang dihadapi yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan dan dilaksanakan.

berdasarkan pernyataan tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, dimana peran serta masyarakat sangat penting untuk tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, kesadaran masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan, terutama dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa, sehingga nantinya partisipasi mereka akan terlihat.

Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya di mana dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat terdapat berbagai pendapat. Beberapa penelitian memiliki perbedaan hasil penelitian seperti Khrissaputro (2017:150), hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Mlopoarjo sudah dilaksanakan dengan baik pada tingkat RT, dusun, dan desa. Tetapi partisipasi masyarakat hanya sampai pada tahap mengusulkan, mereka tidak ikut menentukan prioritas pembangunan artinya masyarakat hanya mengikuti proses mengeluarkan ide atau gagasan tidak mengikuti hingga tahap akhir yaitu pengajuan daftar usulan RKP Desa. Dalam penelitian ini tidak adanya penjelasan mengenai faktor apa yang menjadi hambatan masyarakat sehingga hanya berpartisipasi sampai tahap pengusulan rencana kerja pemerintah desa.

Sifat ketergantungan adalah hal kurang menguntungkan pada masyarakat. Mereka tidak akan berkembang dikarenakan tidak adanya partisipasi dalam mengeluarkan pendapat terutama dalam proses perencanaan RKP Desa padahal ini merupakan hal yang utama demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Wibowo, dkk. (2014:51) partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di desa Mojo

masih dipengaruhi oleh berbagai hal seperti masalah ketenagakerjaan, ketimpangan ekonomi, dan masih bergantung masyarakat dengan pemerintah, pemerintah desa, dan pemerintah pusat.

Keterlibatan dalam proses perencanaan RKP Desa adalah hal yang krusial demi tepat sasaran program kerja desa yang dirancangan. Katili, dkk. (2018:6) dari Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa kurang/rendah. Masyarakat desa kurang melibatkan diri dalam penyusunan dan pembahasan RPJM dan RKP, baik secara langsung melalui Musrenbang Desa maupun tidak langsung melalui perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat. Perlu penelitian mendalam mengenai apa yang menjadi faktor hambatan masyarakat desa Tanjung Una sehingga keterlibatannya dalam perencanaan pembangunan desa masih rendah.

Dari uraian penelitian di atas memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan partisipasi Masyarakat Desa di mana masih terdapat kesenjangan penelitian. Jadi penelitian tentang ini Penting untuk dilakukan dengan mengamati keterlibatan masyarakat yang ada di Desa Lampuara apakah masyarakat desa lampuara berpartisipasi dalam prosesnya yakni perencanaan rencana kerja pemerintah desa demi maksimalnya kegiatan pembangunan di Desa Lampuara, maka penetili tertarik untuk mengambil judul penelitian: “**Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi Kasus : Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu)**”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang disebutkan sebelumnya, Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, tetapi dalam keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, tetap saja Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam partisipasi terhadap kegiatan pembangunan Desa. Dengan keterlibatan masyarakat, pembangunan menjadi cepat terealisasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat Partisipasi masyarakat di Desa Lampara, berikut pertanyaan :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rencana kerja pemerintah desa di Desa Lampuara?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rencana kerja pemerintah desa di Desa Lampuara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rencana kerja pemerintah desa di Desa Lampuara.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rencana kerja pemerintah desa di Desa Lampuara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa diharapkan mampu memberi manfaat

bagi berbagai pihak terkait.

141 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini harus memberikan wawasan lebih lanjut Membangun pembaca dan penelitian yang telah ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih peduli. Terhadap keikutsertaan dalam proses perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

142 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Lampuara. Adanya penelitian ini diharapkan juga dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Lampuara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas teori yang mendasari penelitian ini. Pembahasan yang ada akan menjadi landasan dasar dalam penelitian ini. Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa akan didasari dengan pemahaman mengenai kaitan teori antara partisipasi Masyarakat, perencanaan pembangunan desa, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli

Hetifah berpendapat, "Partisipasi sebagai komitmen sukarela oleh orang-orang tanpa tekanan dan kepentingan eksternal bangsa." Menurut Histiraludin "Partisipasi itu seperti alat untuk mendapatkan partisipasi untuk dimaknai sebagai keterlibatan." Masyarakat terlibat aktif sebagai media dalam seluruh proses kegiatan Tumbuhnya kohesi antara masyarakat, masyarakat dan pemerintah Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dengan program-program seperti: Istilah "partisipasi" telah menjadi kata kunci untuk semua program selama ini. Pengembangan masyarakat seolah-olah harus menjadi "model baru" yang seharusnya Terlampir pada semua pengembangan kebijakan dan proposal proyek. Di Perkembangan sering diucapkan dan ditulis berulang-ulang, tetapi tidak terlalu banyak Saya berlatih untuk cenderung kehilangan kepentingan. Partisipasi sesuai Pentingnya partisipasi, keterlibatan, keterlibatan, atau proses pemahaman bersama, Perencanaan, analisis, dan pelaksanaan tindakan oleh masyarakat. Berikutnya

menurut Slamet menyatakan bahwa, partisipasi ada tiga tradisi konsep partisipasi yaitu :

1. Partisipasi politik (political participation)
2. Partisipasi social (sosial participation)
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

Berikut uraian penjelasannya :

1. Partisipasi politik adalah "Pengaruh" dan "Kongres Rakyat" dalam sistem Pemerintah bukannya berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan daripada mengikuti proses pemerintahan.
2. Partisipasi Sosial adalah penerima manfaat atau pemangku kepentingan di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan pada semua tahap siklus proyek pembangunan, dari analisis kebutuhan hingga evaluasi, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya membantu meningkatkan proses belajar dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah kebijakan publik itu sendiri, tetapi keterlibatan masyarakat dalam dunia kebijakan publik lebih ditujukan sebagai sarana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga menekankan keterlibatan langsung warga negara dalam pengambilan keputusan dalam sistem dan proses pemerintahan. Partisipasi warga menggambarkan konsep partisipasi sebagai "suatu cakupan luas dari keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang penting yang mempengaruhi kehidupan mereka, dimulai

dengan keprihatinan belaka tentang mereka yang diuntungkan atau dikecualikan." Ini menjelaskan. Pindah ke masalah morfologi. Berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi masyarakat membahas agenda politik. Partisipasi dapat digambarkan sebagai komunitas pembangunan untuk komunitas saja. Secara khusus, masyarakat tidak merasa memiliki dan dikritik karena tidak peduli dengan program pembangunan yang ada. Menempatkan masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting. Dengan begitu, masyarakat dapat terlibat aktif dalam segala hal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Apalagi jika menerapkan pendekatan pembangunan dengan semangat lokal. Komunitas dengan pemahaman terbaik tentang situasi di wilayahnya tentu akan memberikan kontribusi yang tak tergantikan. Sebuah komunitas pengetahuan dan pengalaman adalah keuntungan besar dalam pembangunan. Orang-oranglah yang mengetahui masalah dan kemungkinan komunitas. Mereka bahkan memiliki kearifan lokal untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi.

Partisipasi bukan hanya salah satu tujuan pembangunan sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses pembangunan sosial. Partisipasi dalam masyarakat berarti adanya manusia seutuhnya, dan tuntutan untuk berpartisipasi dalam masyarakat semakin disertai dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Perencanaan partisipatif disusun melalui diskusi kelompok yang terarah atau terarah, terutama ketika mengembangkan program-program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kelompok masyarakat strategis

dianggap sebagai kelompok yang paling mengetahui potensi, kondisi, permasalahan, keterbatasan, dan manfaat (kebutuhan) masyarakat setempat, sehingga sebenarnya berdasarkan ukuran prioritasnya dan lebih luas. diterima) oleh masyarakat. Itu dapat diimplementasikan dengan andal. Pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan efisien). Ini berarti optimalisasi distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi, peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran, pengembangan dan peningkatan kegiatan masyarakat baru. Peningkatan kemandirian dan partisipasi sosial juga dicapai secara optimal di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Karena program pembangunan direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah kota sendiri, pemerintah kota juga terlibat langsung. Keterlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, kontraktor lokal yang terampil. Keterlibatan masyarakat harus benar-benar diikutsertakan dalam pemantauan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan tepat waktu, berkualitas, dan terlaksana sesuai peruntukannya. Ini benar-benar melibatkan keterlibatan masyarakat dalam persiapan program, pelaksanaan program, dan penghentian. Dengan pengawasan, atau pelaksanaan (implementation), program-program pembangunan juga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Theresia (2014:196-199) partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian

dalam kegiatan bersama (Sumaryadi: 2010:46). Selanjutnya Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), antara lain sebagai berikut. “(a) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. (b) partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyekproyek pembangunan. (c) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. (d) partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampakdampak sosial. (e) partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. (f) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.”

Dalam konteks ini, Masyarakat memiliki hak untuk dikonsultasikan dalam konteks ini Menentukan jenis pembangunan yang akan berlangsung di daerah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi pelaku pembangunan dan dan dipersiapkan untuk merumuskan masalah mereka hadapi, rencanakan langkah-langkah yang diperlukan, dan laksanakan untuk menikmati dan menyimpan produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian Dapat disimpulkan bahwa masyarakat di atas, masyarakat adalah kelompok berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki infrastruktur untuk kegiatan ini dan adanya ikatan untuk mencapai tujuan bersama

Dengan memperluas peluang dan perkembangan tertentu, beberapa daerah atau kelompok masyarakat tertentu dapat memperkuat keterlibatannya dalam bentuk

kegiatan produktif. Ternyata semua urusan dunia tentang pembangunan dan isu-isu lainnya serta rencana pembangunan Desa Lampara perlu didiskusikan sebelum mengambil keputusan agar rencana tersebut dilaksanakan dengan baik dan tidak disalahpahami nantinya.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu tindakan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, untuk melaksanakan pembangunan desa yang efektif dilakukan melalui musyawarah.

2.3 Pembangunan Desa

2.3.1 Pengertian Pembangunan Desa

Pada hakikatnya pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan Negara yang lain.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2013:526) pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatannya yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan). Sedangkan menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Fakih mendefinisikan pembangunan yang dikaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau perubahan masyarakat dari tradisional kmodern. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan masyarakat tradisonal,

prakondisi lepas landas, gerak menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih. Menurut Siagian pembangunan adalah Suatu usaha atau rangkain usaha pertrumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

2.3.2 Strategi Pembangunan

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Program-program pembangunan pedesaan tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah:

- a. pembangunan pertanian (agricultural development)
- b. industrialisasi pedesaan (rural industrialization)
- c. pembangunan masyarakat desa terpadu (integrated rural development)
- d. strategi pusat pertumbuhan (growth centre strategy)

Pembahasan berikut menjelaskan secara singkat prasyarat dan tujuan dasar. Bagaimana pelaksanaan program dan beberapa kendala Jika dilaksanakan. Uraian berikut berusaha membahas secara ringkas asumsi-asumsi dasar, sasaran dan bagaimana pelaksanaan program-program tersebut, serta beberapa hambatan ketika diimplementasikan.

a. Pembangunan pertanian (agricultural development)

Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat pedesaan.

Peningkatan produksi pertanian diperlukan tidak hanya untuk kebutuhan pangan (baik pedesaan maupun perkotaan), tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan domestik serta menghasilkan produk ekspor pertanian yang dibutuhkan oleh negara maju, karena itu dinilai sangat strategis. Dengan dilaksanakannya program pembangunan pertanian ini, sistem pertanian dan model pertanian telah direvisi. Inilah sebabnya mengapa istilah Revolusi Hijau lahir. Di Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas, program pembangunan pertanian yang dicanangkan secara intensif oleh pemerintah orde baru dalam Perita 1 telah mencapai hasil yang luar biasa. Awalnya menduduki peringkat sebagai importir beras nomor satu dunia, Indonesia telah menjadi negara yang mandiri. Industrialisasi Pedesaan Tujuan utama Program Industrialisasi Pedesaan adalah pengembangan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan upaya yang sangat strategis untuk mengatasi permasalahan semakin sempitnya rata-rata kepemilikan dan pengelolaan tanah pedesaan, serta semakin sempitnya kepemilikan dan pengelolaan rata-rata ketahanan tenaga kerja yang terbatas Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka.

Peningkatan produksi pertanian diperlukan tidak hanya untuk kebutuhan pangan (baik pedesaan maupun perkotaan), tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan domestik serta menghasilkan produk ekspor pertanian yang dibutuhkan oleh negara maju, karena itu dinilai sangat strategis. Dengan dilaksanakannya program pembangunan pertanian ini, sistem pertanian dan model

pertanian telah direvisi. Inilah sebabnya mengapa istilah Revolusi Hijau lahir. Di Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas, program pembangunan pertanian yang dicanangkan secara intensif oleh pemerintah orde baru dalam Perita 1 telah mencapai hasil yang luar biasa. Awalnya menduduki peringkat sebagai importir beras nomor satu dunia, Indonesia telah menjadi negara yang mandiri. Industrialisasi Pedesaan Tujuan utama Program Industrialisasi Pedesaan adalah pengembangan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan upaya yang sangat strategis untuk mengatasi permasalahan semakin sempitnya rata-rata kepemilikan dan pengelolaan tanah pedesaan, serta semakin sempitnya kepemilikan dan pengelolaan rata-rata ketahanan tenaga kerja yang terbatas.

Prospek program ini diyakini cukup cerah antara lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan tidaklah terlalu sukar sehingga mudah mengajak anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif,
- b) kebutuhan investasinya terjangkau oleh sebagian besar anggota masyarakat desa sehingga bisa merata kesegenap lapisan masyarakat,
- c) bahan baku produksi dapat ditekan,
- d) dapat dikerjakan secara komplementer dengan kegiatan produksi lainnya (sambil bertani). Program ini dalam implementasinya menjumpai beberapa hambatan sehingga sukar mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan tersebut antara lain terletak pada nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat desa sendiri. Anggota masyarakat desa terkesan kurang siap menyongsong industrialisasi.

Mereka pada umumnya mudah merasa puas dengan hasil produksi yang pernah dicapai. Mereka juga kurang berani mengambil resiko, dan oleh karenanya sulit didorong untuk melakukan reinvestasi. Keterampilan mereka yang dipergunakan sederhana, kapasitas produksinya terbatas, dan manajemennya pun lemah sehingga sangat sukar meningkatkan kualitas produksinya.

Kendala lain adalah kurangnya koneksi organik antara sektor besar dan kecil. Mereka bekerja secara mandiri, memiliki kemampuan bersama, dan sulit untuk melembagakan kolaborasi dalam meningkatkan proses produksi, memperkenalkan teknologi baru, dan memasarkan produk. Jika pemilik modal berinvestasi di desa, maka industri pedesaan tidak akan berkembang nantinya, tetapi akan menjadi industri padat modal di lingkungan desa. Jenis industri ini tidak banyak menciptakan lapangan kerja, terutama karena anggota masyarakat desa tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk melakukan tugas yang diperlukan. Sumber daya Anda lemah.

b. Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu (Integrated Development)

Tujuan utama dari program pengembangan masyarakat pedesaan terpadu adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan dan meningkatkan kemandirian mereka. Menurut Waterston, ada enam elemen dasar yang unik untuk jenis program pembangunan ini. Yaitu, (a) pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya, (b) perluasan kesempatan kerja, dan (c) penguatan pekerjaan skala kecil dengan mengembangkan industri kecil. Di daerah pedesaan, (yaitu) meningkatkan

partisipasi mandiri dalam proses pengambilan keputusan, (e) mengembangkan daerah perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, dan (f) mendirikan lembaga yang dapat mengkoordinasikan proyek-proyek multi-sektor

Prinsip-prinsip serupa juga pernah dilontarkan oleh Rehovot School dalam mendekati pembangunan masyarakat desa terpadu, yang antara lain mencakup:

a) Pertumbuhan pertanian sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan pedesaan, (meliputi: diversifikasi usaha tani, keluarga tani sebagai unit organisasi, perkembangan simultan sistem penyangganya, organisasi oleh dan untuk petani, sert industrialisasi pedesaan),

b) Urbanisasi sebagai faktor promosi bagi pembangunan pedesaan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini lebih menekankan transformasi sektor pertanian sebagai the prime mover. Transformasi tersebut adalah perubahan secara gradual (tetapi pasti) dari pertanian subsistence menjadi pertanian komersial. Pendekatan ini juga mengamjurkan adanya fusi atau gabungan dari strategi top-down dan strategi bottom-up. Strategi top-down dianggap terlalu banyak diwarnai oleh pemaksaan, sementara strategi bottom-up dianggap terlalu percaya pada kekuatan lokal dan mengingkari kelemahan yang terdapat ditingkat bawah. Itulah sebabnya penggabungan dua macam strategi tersebut diyakini akan banyak mendatangkan kesejahteraan bagi segenap anggota masyarakat.

c. Strategi Pusat Pertumbuhan (growth centre strategy)

Salah satu elemen program pembangunan pedesaan yang terabaikan yang sedang dibahas, khususnya program pengembangan masyarakat desa terpadu, adalah ruang, yang berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan proyek dan tidak terlalu memperhatikan hubungan antara lokasi dan pembangunan. Sebuah ruang dengan ekonomi yang lebih luas, terutama lokasi dan lokasi kota. Oleh karena itu, berbagai prasarana dan sarana tampak dibangun semata-mata untuk kepentingan proyek itu sendiri, tanpa mempertimbangkan jarak ideal dari kota dalam berfungsi sebagai pasar atau sarana distribusi produk..

Strategi growth center merupakan salah satu alternatif yang ditujukan untuk mengatasi masalah ini. Metode pilihan adalah membangun atau mengembangkan pasar di dekat desa. Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyimpanan barang-barang desa, tetapi juga sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keinginan konsumen dan keterampilan produsen, atau yang biasa disebut sebagai pusat “demonstrasi efek” barang-barang konsumen. Informasi tersebut sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena mengurangi kejelasan perkembangan perusahaan.

Pusat pertumbuhan semacam itu diupayakan agar dikembangkan sedemikian rupa sehingga secara sosial tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ini disamping secara langsung dapat menjawab berbagai persoalan pemasaran atau distribusi hasil produksi pertanian, juga dapat disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa. Pengelolaan semacam ini akan

mengurangi ketergantungan dan sangat dibutuhkan bagi pengembangan kewiraswastan. Pusat pertumbuhan itu akan melahirkan sebuah komunitas desa kota (urban), yang ditandai dengan kemauan untuk menerima prinsip-prinsip ekonomi uang namun tetap tidak kehilangan nilai-nilai juga sesuai dengan iklim usaha masyarakat desa. Pusat pertumbuhan itu juga tidak terlalu besar, sehingga setiap perkembangan yang mengarah pada lahirnya monopoli oleh kelompok ekonomi kuat dapat segera dikontrol dan dihindari. Banyak pengamat melihat bahwa strategi pusat pertumbuhan ternyata juga kurang begitu berhasil meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa.

Konsep pusat pertumbuhan ternyata tidak melahirkan pemukiman baru dengan komunitas berkarakter yang dibayangkan masih mempertahankan nilai-nilai desa tetapi mau menerima nilai-nilai kota. Yang justru tumbuh adalah sebuah reartikulasi pola pemikiran desa, yang dihuni oleh orang dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang hadir bersama dengan program tersebut.

2.3.3 Sasaran Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sasaran umum yang diharapkan dapat dicapai adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya pertanian (agricultural resource based) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran khusus sebagai berikut :

- a) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar seluruh wilayah.
- b) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- c) Tercapainya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.
- d) Konsep Perencanaan Pembangunan dari Bawah (Bottom Up Planning)
Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari keterlibatan peran serta Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi harus dipandang pula sebagai subyek pembangunan. Pembangunan pedesaan harus diletakkan dalam konteks: (1) sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) sebagai upaya mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan kokoh.

Rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. Karena dana

atau anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembanguann yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan : (1) penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan proritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur, dan (2) didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut bottom up planning. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social emprowering) secara nyata dan terarah. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan didaerah tersebut Bentuk partisipasi masyarakat tersebut antara lain, mereka bersedia menyerahkan sebagai lahan/tanahnya yang dilewati oleh pembangunan jalan desa atau jaringan irigasi, tanpa meminta pembayaran ganti rugi harga lahan/tanah tersebut, kerja bersama-sama dalam pembangunan jalan desa (tanpa diberikan upah), dan lainnya.

2.4 Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan? Bilamana akan dilakukan? Dan siapa yang akan melakukan? Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena

kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin dirumuskan

kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien yang dapat memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: tujuan akhir yang ingin dicapai, sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir, jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya, orang/organisasi atau badan pelaksanaannya.

Menurut Nickels, McHugh and McHugh (dalam Tisnawati Sule dan Saefullah 2010:8) menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi adalah perencanaan (*Planing*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Directing*), dan pengawasan (*Controlling*). Fungsi perencanaan yaitu perencanaan (*planing*) sering kali merupakan pokok dasar tercapainya suatu tujuan. Dan dalam membuat suatu rencana ini, haruslah diberikan kepada pihak yang lebih mengetahui konsep tujuan yang akan dicapai.

Di daerah pedesaan dan kelurahan dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah program kerja dalam bidang pembangunan, maka dalam hal pembuatan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan akan diserahkan pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang memiliki *statement* dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

2.5 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)

Proses penyusunan rencana dimulai dengan tahap penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa untuk jangka waktu 6 Tahun. RPJMDes adalah program pemerintah yang mengatur tentang rancangan dan penyusunan pembangunan desa yang disusun oleh kepala desa. Irwan Muhadi (2013:8)
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 Tahun.

RPJM Desa maupun RKP Desa, keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan dan menjadi dasar pedoman dalam penyusunan APB Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik, sedangkan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa

mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun berjalan. Selain RPJM Desa dan RKP Desa, ada lagi yang namanya Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari RKP Desa yang akan diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah. RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

➤ **Tahapan Penyusunan RPJMDes**

Dalam penyusunan RPJM Desa, Kepala Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Berikut ini tahapan penyusunan RPJM Desa :

Tahap 1 : Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Tahap 2 : Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Tahap 3 : Pengkajian Keadaan Desa

Tahap 4 : Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Tahap 5 : Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tahap 6 : Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Tahap 7 : Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan RPJM Desa

Kepala Desa memiliki wewenang dalam mengubah RPJM Desa apabila terjadi dalam hal berikut ini :

1. Apabila terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Apabila terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Dan Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

➤ **Tahapan Penyusunan RKPDes**

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang nantinya akan menjadi dasar Pemerintah Desa dalam penetapan APB Desa. Dalam menyusun RKP Desa, Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat Desa. Adapun kegiatan dalam penyusunan RKP Desa diantaranya adalah sebagai berikut :

Tahap 1 : Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Tahap 2 : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Tahap 3 : Pencermatan Pagu Indikatif Desa Dan Penyelarasan Program/Keg.

Masuk ke Desa

Tahap 4 : Pencermatan Ulang RPJM Desa

Tahap 5 : Penyusunan Rancangan RKP Desa

Tahap 6 : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Tahap 7 : Penetapan RKP Desa

Tahap 8 : Perubahan RKP Desa

Tahap 9 : Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Demikian sekilas terkait dengan tahapan dan sistematika penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya yang ada di Desa.

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Mohtar dan Chollin (2011:41), di samping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial-ekonomis juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi. Selain itu, sejumlah faktor lingkungan juga mempengaruhi hasil tingkat partisipasi seperti apakah pemilihan itu berlangsung pada satu saat krisis, sejauh mana kebijakan pemerintah itu relevan bagi individu, luasnya kesempatan individu dapat mempergunakan informasi yang relevan, sejauh

mana individu tunduk pada kelompok penekan (golongan berpengaruh) dalam pemberian suara, dan sejauh mana individu mengalami tekanan yang berlawanan. Menurut Yulianti (2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan

menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Menurut Sunarti, faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Hasil Penelitian Putri, dkk. (2017:144)

Penelitian Putri, dkk. (2017:144) berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tergolong tinggi dengan rata-rata skor 72,76%. Adapun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari adalah kesadaran/kemauan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan.

2. Hasil Penelitian Wibowo, dkk. (2014:51)

Penelitian Wibowo, dkk (2014:51) berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mojo Kecamatan Andong Kabupaten

Boyolali”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di desa Mojo masih dipengaruhi oleh berbagai hal seperti masalah ketenagakerjaan, ketimpangan ekonomi, dan masih bergantung masyarakat dengan pemerintah, pemerintah desa, dan pemerintah pusat.

3. Hasil Penelitian Kanaha (2018:30)

Penelitian Kanaha (2018:30) berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kepala Desa Tolonuo memiliki berperan aktif dalam setiap penyusunan program dan pelaksanaan program pembangunan, mengkoordinir, memantau masyarakat untuk berpartisipasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di desa.

4. Hasil Penelitian Khrissaputro (2017:150)

Penelitian Khrissaputro (2017:150) berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Mlopoharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri”. Metode pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat di desa Mlopoharjo sudah dilaksanakan dengan baik pada tingkat RT, dusun, dan desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

tingkat RT berada pada level kemitraan, kemudian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat dusun berada pada level kemitraan, sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat desa berada pada level penentraman dikarenakan kontrol masyarakat hanya sampai pada tahap mengusulkan, mereka tidak ikut menentukan prioritas pembangunan.

5. Hasil Penelitian Agustin (2016:12).

Penelitian Agustin (2016:12) berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dinilai baik yang ditunjukkan dengan peran serta masyarakat yang aktif dalam pembangunan Japordes meskipun perlu adanya evaluasi dalam pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes) agar dapat terselesaikan dengan baik.

6. Hasil Penelitian Katili, dkk. (2018:6).

Penelitian Katili, dkk. (2018:6) berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih kurang/rendah. Masyarakat desa belum banyak berpartisipasi pada

penyusunan dan pembahasan RPJM dan RKP, baik secara langsung ikut melalui musrembang desa, maupun secara tidak langsung melalui perwakilan masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat.

7. Hasil Penelitian Yanti, dkk. (2019:429)

Penelitian Yanti, dkk. (2019:429) berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah)”. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa sudah terlaksana dengan baik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tersapat dua yakni faktor eksternal dan internal.

8. Hasil Penelitian Hakim (2017:43)

Penelitian Hakim (2017:43) berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang”. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat merasa puas.

9. Hasil Penelitian Widowati (2007)

Penelitian Widowati (2007) berjudul “Kajian Partisipasi Masyarakat da-

lam Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah Di Kabupaten Pati” metode penelitian menggunakan survey dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan tabulasi silang. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui wawancara maupun olahan kuesioner menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat yang diambil di empat kecamatan sampel menunjukkan tingkatan rata-rata. Partisipasi masyarakat dalam tataran perencanaan telah diterapkan dengan baik, namun hanya masuk dalam tangga tokenisme Arnstein Dalam tataran penganggaran partisipasi masyarakat dianggap tidak ada (non-participation), karena hanya mencapai tangga manipulasi dan terapi.

10. Hasil Penelitian Rupini (2018:46).

Penelitian Rupini (2018:46) berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng”. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sangsit berpartisipasi dalam pembangunan desa dimulai dari proses perencanaan melalui Musrenbangdes, pelaksanaan pembangunan, ikut dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus akan berkurang kedalamannya apabila hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umumnya. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya jika hanya diajukan sekedar untuk memperoleh gambaran umumnya tanpa menemukan sesuatu yang khusus untuk dipelajari secara intensif dan mendalam. Artinya dalam studi kasus data yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini

peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

3.3 Sumber Data

Sumber data akan diambil dari informan, gambar, dokumen dan transkrip wawancara.

1. Informan

Informan dalam penelitian ini yakni berjumlah 4 orang meliputi Wakil Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Leppangang, dan Satu orang perwakilan warga Desa Lampuara.

2. Dokumen

Dalam penelitian ini, dokumen yang di gunakan adalah data-data yakni berupa profil desa dan struktur organisasi desa di Desa Lampuara.

3. Gambar

Gambar dalam penelitian ini adalah dokumentasi pada saat melakukan observasi dan wawancara terhadap partisipan pada pelaksanaan Musrembang Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

4. Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara atau menyalin wawancara adalah catatan tertulis dari wawancara lisan yang telah selesai dilakukan. Menyalin wawancara sendiri merupakan kegiatan mendokumentasikan percakapan antara dua orang atau lebih.

3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena merupakan desa potensial terutama petani sawah dan rumput laut. Namun sektor tersebut tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak didukung dengan fasilitas memadai.

2. Waktu

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, yakni Mei 2022 sampai Juli 2022

3.5 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode kualitatif memperlakukan partisipan sebagai subjek bukan objek sehingga partisipan menganggap dirinya berharga karena informasi dari mereka sangat bermanfaat.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data

yang satu dengan yang lain. Teknik menurut Sugiyono (2015:83) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulabvn data dan sumber yang telah ada. Ada empat (4) yaitu: teknik Triangulasi dengan sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi yakni mengadakan perbandingan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, triangulasi dalam penelitian ini meliputi triangulasi teori dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu perbandingan atau pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.
- b. Membanding apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membanding data hasil wawancara dengan isi dokumen yang dihimpun atau berkaitan.

3.7 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara

penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara untuk proses mem-

peroleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Pada pelaksanaan wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab, yakni bertatap muka antara penanya dengan si penjawab.

2. Observasi

Observasi yang dimaksud yaitu penulis akan turun observasi langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa Lampaara.

3. Dokumentasi

Penulis menggunakan dokumentasi karena mengumpulkan data meneliti dengan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan sebagai tanda bukti bahwa penulis telah melakukan penelitian secara langsung.

3.8 Teknik Analisis Data

Creswell (2013) menjabarkan lebih detail dalam analisis dalam langkah analisis data berikut ini:

1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya.
2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan

tersebut (horisnoalisasi data) dan perlakukan setiap pernyataan setara, serta kembangkan rincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan (nonrepetitive) atau tumpang tindih (nonoverlapping).

3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit makna (meaning units), peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks (textural description) tentang pengalamannya, termasuk contoh-contohnya secara seksama.
4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif (imaginative variation) atau deskripsi struktural (structural description), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif divergen (divergent perspectives), mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala (phenomenon) dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami.
5. Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi (essence) pengalamannya.
6. Dari deskripsi tekstural dan struktural individu, berdasarkan pengalaman tiap partisipan, peneliti membuat composite description.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA LAMPUARA DAN PROSES PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Lampuara

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Lampuara

Desa Lampuara merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Desa Lampuara terdiri dari empat dusun, diantaranya Dusun Ujung, Dusun Leppangeng, Dusun Lampuara dan Dusun Tanete. Pada periode pemerintahan sekarang ini struktur pemerintahan Desa Lampuara dipimpin oleh satu orang kepala desa yaitu Bapak Adam Nasrun dengan masa periode tahun 2020 sampai 2026.

Berdasarkan data yang peneliti temukan, secara administratif, jumlah penduduk di Desa Lampuara yaitu 2.833 Jiwa dengan rincian laki-laki 1.360, perempuan 1.473 Jiwa. Jumlah kepala keluarga 734 KK (Kepala Keluarga).

4.1.2 Letak Geografis

Batas-batas administrasi pemerintahan Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Olang
- Sebelah Selatan : Desa To'balo/Desa Jenne Maeja/To'bia
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Desa Bakti

Mata pencaharian Di Desa Lampuara ada 3 sektor yang menopang perekonomian masyarakat yaitu sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.

Deskripsi Pertanian/Peternakan/Perikanan dan kelautan

1. Pertanian Dari segi pertanian ada dua macam yaitu padi dan perkebunan (Coklat)
2. Peternakan Ada banyak peternakan yang ada di Desa Lampuara diantaranya yaitu sapi, kambing, ayam, bebek, itik dan beberapa jenis ikan tertentu.
3. Perikanan dan Kelautan Budi daya rumput laut, budi daya ikan dengan tempat berkembang biak yakni di Empang

4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di desa lampuara berjumlah 2.833 jiwa memiliki perbedaan tingkat pendidikan mayoritas tingkat pendidikan warga masyarakat desa lampuara hanya sampai jenjang pendidikan tingkat SMA sejumlah 581 jiwa. Selanjutnya lulusan tingkat SMP 231 jiwa, Diploma 118 jiwa, S1 174 jiwa dan S2 1 jiwa. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Desa Lampuara Tahun 2020

No.	Lulusan Sekolah	Jumlah Jiwa
1	SD atau sederajat	718 jiwa
2	SMP atau sederajat	600 jiwa
3	SMA atau sederajat	881 jiwa
4	Diploma	61 jiwa
5	S1	78 jiwa
Total		2.338 Jiwa

Sumber Data : Profil Desa Lampuara

4.1.4 Keadaan Topografi

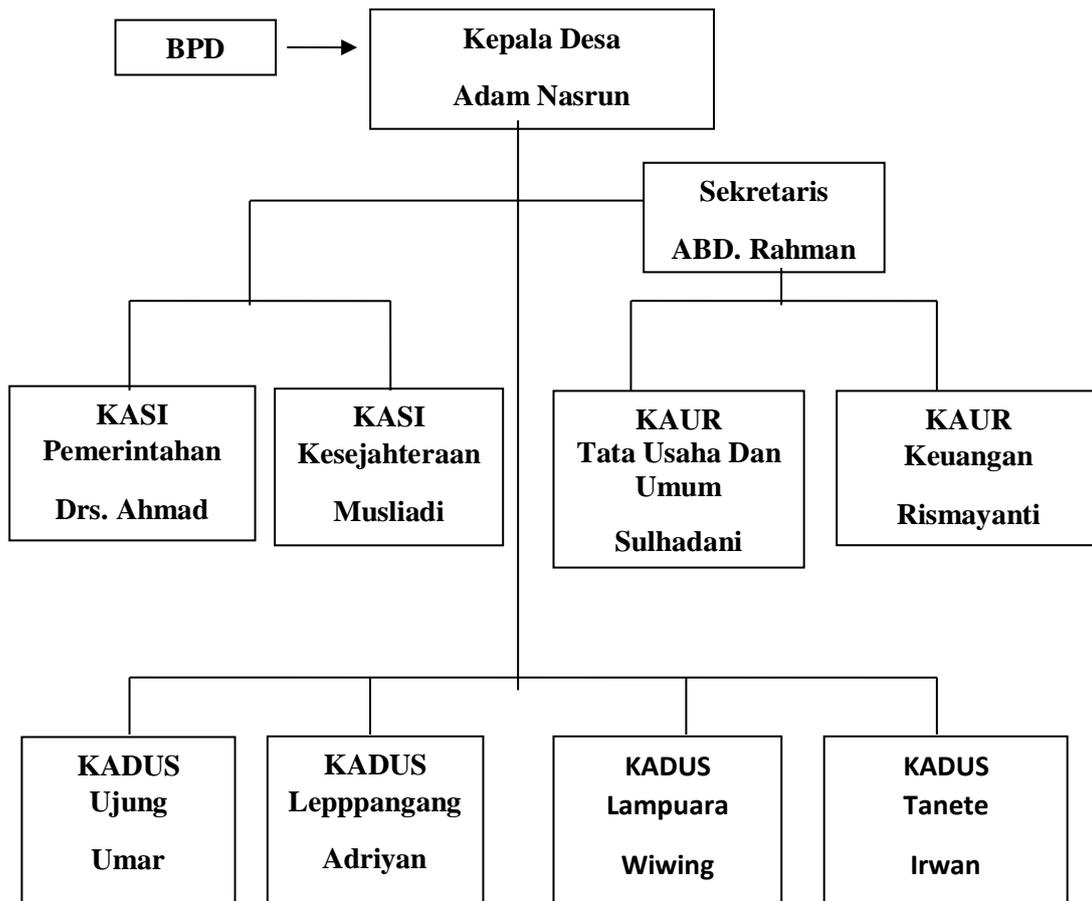
Dilihat dari topografi dan kondisi tanah, desa sungai gondang secara umum berupa perkebunan dan persawahan dengan jenis tanah yaitu tanah basah dan kering. Dan berada diketinggian 14 MDPL dengan suhu rata-rata berkisar antara 35 derajat celsius. Desa Lampuara terdiri dari empat dusun, dan waktu tempuh dari ibukota kabupaten 20,6 km dengan waktu tempuh 35 menit.

4.1.5 Struktur Pengurusan Aparatur Desa Lampuara

Desa Lampuara dipimpin oleh Bapak Adam Nasrun dalam tugasnya sebagai kepala desa dibantu oleh aparatur desa lainnya. Bapak Abd. Rahman sebagai sekretaris desa bertugas menerbitkan bidang administrasi. Selanj Bapak Muhammad Akis sebagai ketua badan permusyawaratan desa (BPD). Dalam melaksanakan tugasnya kades juga dibantu oleh 4 (empat) orang kepala urusan (Kaur) diantaranya kaur pemerintahan yang diamanatkan kepada Bapak Drs. Ahmad, kaur kesejahteraan bapak Musliadi, kaur tata usaha dan umum ibu Sulhadani dan kaur keuangan ibu Rismayanti. Seperti yang tersaji dalam bagan berikut ini:

Struktur Organisasi Desa

**STRUKTUR PEMERINTAH
DESA LAMPUARA
KECAMATAN PONRANG SELATAN**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa

4.2 Proses Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Lampuara di mulai pada tanggal 13 Juni 2022 sampai pada tanggal 22 Agustus 2022. Dalam proses pengambilan data, hal pertama yang dilakukan peneliti yaitu berkunjung ke Kantor Kepala Desa untuk menjumpai Kepala Desa sekaligus menyerahkan surat pengantar izin untuk melakukan

penelitian dan memperkenalkan diri (Senin, 13 Juni 2022). Dengan pengambilan data terdiri observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun Informan Penelitian Infroman pada penelitian ini adalah aparat Desa dan masyarakat di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yakni Wakil Kepala BPD, Sekretaris Desa, Kadus Lepppangang, dan salah satu Masyarakat yakni sebagai berikut:

Tabel 4.2
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1	Halimah	Wakil Ketua BPD
2	Abd. Rahman	Sekretaris Desa
3	Adriyan	Kadus Leppangang
4	Hakim	Masyarakat

BAB V

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA : FAKTOR PENGHAMBAT MASYARAKAT TIDAK BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN MUSRENBANG

5.1 Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 Tahun. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang nantinya akan menjadi dasar Pemerintah Desa dalam penetapan APB Desa. Dalam menyusun RKP Desa, Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat Desa. Di desa Lampuara sendiri telah dilakukan kegiatan musyawarah desa dalam menentukan RKPDes untuk anggaran tahun 2023 dalam melakukan penyusunan tersebut ditemukan bahwa ternyata di Desa Lampuara lebih cepat dari perkiraan waktu yang di tentukan. seperti pernyataan yang dikemukakan Sekretaris Desa Lampuara Bapak Abd. Rahman:

“Bulan dua kemarin kami telah melakukan kegiatan musyawarah desa untuk tahun anggran 2023”

Dengan adanya penjabaran rencana pembangunan menengah desa yakni rencana

kerja perintah desa, pembangunan desa lebih terperinci mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Namun tidak serta-merta semua usulan dari masyarakat akan disetujui atau menjadi usulan dari desa itu sendiri karena beberapa pertimbangan. Seperti pernyataan dari bapak Hakim selaku warga masyarakat desa Lampuara berikut pernyataannya:

Ada yang sesuai....seperti pembuatan bendungan masyarakat di sini merasakan manfaatnya dulu petani sawah hanya 2 kali panen dalam jangka waktu 2 tahun namun sejak adanya bendungan sekarang bisa panen padi hingga 5 kali. Tapi ada juga yang menjadi keresahan masyarakat seperti aspal di desa ini yang mengalami kerusakan parah namun belum diperbaiki.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan kenapa permasalahan besar seperti pembangunan infrastruktur jalan masih tersendak padahal kebutuhan ini merupakan hal yang urgensi. Ibu Halimah selaku wakil ketua BPD menjawab pertanyaan tersebut:

Tidak lain permasalahan ini kendalanya dari anggaran dan tidak semua Rencana pembangunan di terima oleh pemerintah daerah.

Tabel 5.1

**Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa
Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2021**

No	Usulan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Volume
1	Pembangunan Saluran Pembuang	Masyarakat Desa	300 M
2	Pembangunan Talud (Kebunnya Opu Esse)	Masyarakat Desa	1500 M
3	Pembangunan Plad Dueker	Masyarakat Desa	8 Unit

4	Pembangunan Drainase	Masyarakat Desa	3 Km
5	Pembangunan Jitot	Masyarakat Desa	3 Km
6	Pengkrikilan Jalan	Masyarakat Desa	1500 M
7	Pengerasan Jalan Tani	Masyarakat Desa	1500 M
8	Pembangunan Drainase	Masyarakat Desa	1500 M
9	Pembangunan Rabat Baton	Masyarakat Desa	500 M
10	Pagar Mesjid	Masyarakat Desa	1 Paket
11	Pembangunan Jitot	Masyarakat Desa	1000 M
12	Pembangunan Tarabatan Perahu	Masyarakat Desa	1 Paket
13	Pembangunan Talud	Masyarakat Desa	1 Km

Sumber Data : Hasil Musrembangdes Desa Lampuara Tahun 2020

Tabel 5.1 menjabarkan bahwa RKPDes pada tahun anggaran 2021 yakni telah dianggarkan pengaspalan jalan sekitar 1,5 KM yang bertempat di Dusun Tanete, Desa Lampuara hal ini telah menjawab kegelisahan warga masyarakat Desa Lampuara bahwa tidak semua program kerja akan langsung teranggarkan di RKPDes melainkan bertahap dan terkait keputusan pemerintah daerah. Dan diketahui bahwa Dusun Tanete ini adalah dusun terakhir yang di mekarkan dan belum pernah di aspal sedangkan ke tiga dusun yakni Dusun Ujung, Dusun Leppangang dan Dusun Lampuara sudah pernah diaspal namun mengalami kerusakan tentunya yang didahulukan yang belum pernah diaspal.

Sejalan pernyataan Ibu Halimah Bapak ABD. Rahman selaku Sekretaris Desa Lampuara mengatakan:

Benar nak masalah utamanya yah anggaran ini, kita tidak bisa bergerak tanpa anggaran.

Tepat sasaran suatu program pembangunan adalah suatu hal patut disyukuri warga masyarakat Desa Lampuara namun tidak semua program kerja yang diusulkan akan terealisasi diakibatkan Keputusan Musrenbangdes tersebut masih melalui proses

Musrenbang pada level yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Usulan masyarakat desa masih akan dikaji oleh tim dari Kabupaten berdasarkan skala prioritas, sehingga penilaian kegiatan akan dilakukan secara integrative meliputi kebutuhan, kelayakan maupun anggaran yang tersedia. Hingga tahap ini, masyarakat Desa Lampuara hanya bisa pasrah dan berharap agar usulan tersebut bisa disetujui.

Adapun tahapan dalam penyusunan RKP Desa diantaranya adalah sebagai berikut :

- Tahap 1 : Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
- Tahap 2 : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
- Tahap 3 : Pencermatan Pagu Indikatif Desa Dan Penyelarasan Program/Keg. Masuk ke Desa
- Tahap 4 : Pencermatan Ulang RPJM Desa
- Tahap 5 : Penyusunan Rancangan RKP Desa
- Tahap 6 : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- Tahap 7 : Penetapan RKP Desa
- Tahap 8 : Perubahan RKP Desa
- Tahap 9 : Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Demikian sekilas terkait dengan tahapan dan sistematika penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya yang ada di Desa.

5.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang

Menurut Theresia (2014:196-199) partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama (Sumaryadi: 2010:46). Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan desa dengan adanya keikutsertaan masyarakat adanya hubungan yang terbangun antara masyarakat dan aparat desa sehingga adanya transparansi dalam proses pembangunan dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai keberpihakan program pembangunan yang direncanakan.

Selanjutnya Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), antara lain sebagai berikut. “(a) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. (b) partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. (c) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. (d) partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. (e) partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. (f) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan

lingkungan mereka.” Kesadaran masyarakat sendiri adalah kunci masyarakat aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam kegiatan musrenbang inilah RKPDes di rancang dengan melibatkan warga masyarakat.

Peneliti memulai penelusuran pada Sekretaris Desa Lempuara, dimana yang menjadi informan adalah Bapak ABD. Rahman selaku Sekretaris Desa dalam menggali informasi mengenai keikutsetaan masyarakat dalam kegiatan musrenbang ditemukan bahwa ada yang ikut serta namun tidak semua dari undangan yang disebar.

Hasil wawancara dengan Bapak ABD. Rahman mengatakan :

Tentunya mereka siap mendukung dan ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan RKP Desa inikan juga untuk kebaikan mereka sendiri. Disamping itu untuk meminta saran dan pandangan terkait dengan pembangunan kita ke depan tentang apa saja yang harus kita bangun.

Hal ini senada dengan dengan pernyataan Bapak Adriyan selaku Kadus Leppangang .beliau mengatakan:

Iya dek, masyarakat Desa Lempuara ikut berpartisipasi dilihat dalam kegiatan Musrempang mereka hadir.

Senada dengan pernyataan Bapak ABD. Rahman dan Bapak Adriyan Ibu Halinah selaku Wakil Ketua BPD mengatakan:

Terkait dengan pertanyaan itu masyarakat ikut berpartisipasi apalagi ini demi kebaikan mereka juga, namun melihat presensi kehadiran masyarakat dari undangan yang disebar sekitar 100 orang hanya 50% yang hadir yakni 50 orang.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang namun masih kurang yakni hanya setengahnya saja dari undangan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini, masyarakat wajib dilibatkan karena kegiatan Musrenbang sendiri merupakan wadah dalam menentukan program kerja apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat yakni tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk program kerja dalam jangka waktu 1 Tahun. Sebagaimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Hal tersebut menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat sangatlah penting demi memenuhi kebutuhan warga masyarakat desa itu sendiri.

Dalam konteks ini, Masyarakat memiliki hak untuk dikonsultasikan dalam konteks ini Menentukan jenis pembangunan yang akan berlangsung di daerah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi pelaku pembangunan dan dan dipersiapkan untuk merumuskan masalah mereka hadapi, rencanakan langkah-langkah yang diperlukan, dan laksanakan untuk menikmati dan menyimpan produk

yang dihasilkan.

5.3 Faktor Penghambat Masyarakat Tidak Ikut Berpartisipasi

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Mohtar dan Chollin (2011:41), di samping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial-ekonomis juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi. Selain itu, sejumlah faktor lingkungan juga mempengaruhi hasil tingkat partisipasi seperti apakah pemilihan itu berlangsung pada satu saat krisis, sejauh mana kebijakan pemerintah itu relevan bagi individu, luasnya kesempatan individu dapat mempergunakan informasi yang relevan, sejauh mana individu tunduk pada kelompok penekan (golongan berpengaruh) dalam pemberian suara, dan sejauh mana individu mengalami tekanan yang berlawanan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Hakim bahwa yang menjadi faktor penghambat sebagian besar masyarakat Desa Lampuara tidak berpartisipasi yakni disebabkan mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mereka menganggap Kepala Dusun telah mewakili aspirasi mereka. Berikut pernyataannya:

Salah satu penyebab masyarakat tidak ikut kegiatan Musrenbang yakni disebabkan karena tidak ada kemauan dari si warga tersebut sekalipun ada sosialisasinya. Di samping itu warga desa Lampuara sebagian besar bermata pencaharian petani hal tersebut mengakibatkan mereka lebih memilih ke kebun, sawah atau ,mengurus rumput laut mereka.

Faktor yang menjadi pendukung masyarakat dalam berpartisipasi dalam suatu program adalah timbulnya rasa partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dalam perealisasi sikap tersebut ditunjang oleh beberapa faktor pendukung yakni kemauan, kemampuan dan kesempatan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan di mana jika ada kemauan tentu didukung dengan kemampuan dalam hal ini yakni kemampuan menyuarakan pendapat dalam pemenuhan pembangunan desa bagi masyarakat itu sendiri, di samping itu perlunya kesempatan yang diberikan kepada warga masyarakat. Dengan adanya kegiatan musrenbang warga masyarakat Desa Lampuara telah diberikan wadah untuk mengeluarkan pendapatnya.

Menurut Yulianti (2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Menurut Sunarti, faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Di samping partisipasi masyarakat yang merupakan hal yang sangat penting tentunya peran pemerintah juga komponen utama dalam tercapainya suatu pembangunan ibarat kata pemerintah desa adalah jembatan dalam perwujudan program yang direncanakan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Penelitian ini telah sampai pada akhir perjalanannya. Sesuai dengan fokus penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi Kasus : Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu). Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus peneliti telah menggali, memahami, dan mengungkapkan pengetahuan lebih dalam mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi Kasus : Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu). Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara, adapun kesimpulan yang saya dapatkan adalah :

1. Secara umum partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang di Desa Lampuara adalah sedang dengan karakteristik, partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan pendapat usulan/saran juga sedang dilihat dari kehadiran yakni hanya 50% saja. Hal ini dikarenakan Kurangnya sosialisasi akan dilaksanakannya kegiatan musrenbang oleh pemerintah desa sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan diadakannya kegiatan musrenbang dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi..
2. Faktor penghambat masyarakat tidak mengikuti kegiatan musrenbangdes Lampuara diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat untuk meningkatkan hasil pembangunan, kurangnya

sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musrenbang sehingga pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan musrenbang sangat kurang. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi seperti mereka pergi bekerja dari pada mengikuti kegiatan musrenbang dikarenakan tidak ada imbalan atau hadiah apabila masyarakat mengikuti kegiatan musrenbang, harus ada iming-iming hadiah baru masyarakat pergi berpartisipasi dalam musrenbang. dan masyarakat menganggap kehadiran kepala dusun, rt dan rw sudah mewakili kepentingan mereka, serta masyarakat berpendapat bahwa pemerintah desa lebih tau tentang pembangunan desa yang mereka butuhkan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Pada proses perencanaan pembangunan lebih baik apabila masyarakat di Desa Lampuara tetap dilibatkan sampai tahapan akhir penetapan perencanaan agar masyarakat mengetahui dan mengerti aspirasi yang mereka sampaikan dapat terkoordinasi oleh pemerintah daerah atau tidak karena tentunya tidak semua usulan di setujui pemerintah daerah.
2. Disarankan kepada pemerintah desa memberikan pengertian pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang demi meningkatkan keefektivan hasil pembangunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, Meryy. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). 4(1): 1–23. <https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Publika/Article/View/13950>. 20 Februari 2022 (23:22) .
- Hakim, Lukmanul. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. 2(2): 43–53. <https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Politikomindonesiana/Article/View/963>. 20 Februari 2022 (23:20)
- Kanaha, Ibnu. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara). *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(2): 76. 21 Februari 2022 (02:05).
- Katili, Eka Wulandari, Masjey Siliya Pangkey Dengo, Salmin. 2018. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Una Kecamatan taliabu Utara Kabupaten Taliabu (1): 1–8. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/Viewfile/21235/20944>. 21 Februari 2022 (02:15)
- Khrissaputro, Stefanus, Ferry. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Mlopoharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. *Uns Institutional Repository* 110265: 110493. 21. Februari 2022 (02:09)
- Moleong. 2013. “Sumber Data Penelitian Kualitatif.” <http://andreassmr.blogspot.com/2021/>. 22 Maret 2022 (22:15).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Thun 2014 Pedoman Pembangunan Desa. 2014. *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53(9): 1689–99.
- Putri, Sarah, Nuramalia. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung). : 1–32. https://123dok.Com/Document/Qvpwekgq-Partisipasi-Masyarakat-Pembangunan-Temanggung-Diponegoro-University-Institutional-Repository.Html?Utm_Source=Search_V3. 20 Februari 2022 (21.25)
- Rupini, Luh. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. 2018 10 (1): 46–60.
- Soendari, Tjutju. 2001. Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif. Dapat
- Soendari, Tjutju. 2017. “Teknik analisis Data” <https://text-id.123dok.com/document/nzwo2xevy-instrumen-penelitian-uji-keabsahan->

data.html. 24 Februari 2022 (13:23)

- Sumaryadi. 2010. Pengertian Partisipasi. :46. <https://eprints.uny.ac.id/7720/3/bab%20%20-%20%2007110241010.pdf>. 19 Maret 2022 (20:38)
- Sugiono. 2015. "Pengertian Triangulasi." : 22–27. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4014/4/BAB III.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4014/4/BAB%20III.pdf). 0
- _____. 2012. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Alfabeta. Bandung.
- Theresia, Aprillia. 2014. Pengertian Partisipasi. 196-199. <Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. : 303.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Bpkp*. <Http://Www.Bpkp.Go.Id/Sakd/Konten/333/Versi-2.1.Bpkp>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wibowo, Toni, Ari, Joko Pramono & Jana Harjanta. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mojo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. (26): 80–85.
- Yanti, Asri, Arsidik Asuru & Andi Syahrir. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah). 12: 429–40. <Http://Ojs.Uho.Ac.Id/Index.Php/Selami/Article/View/10832>.